

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Sepanjang Triwulan I 2026, inflasi di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren meningkat dari bulan ke bulan. Pada Januari, terjadi deflasi bulanan sebesar -0,67% akibat turunnya harga cabai dan bawang merah. Memasuki Februari, inflasi tercatat naik menjadi 0,46%, didorong oleh kenaikan harga cabai merah keriting (Rp32.333-Rp46.333/kg), bawang putih, dan daging sapi yang mencapai harga acuan Rp140.000/kg. Lonjakan tertinggi terjadi pada Maret dengan inflasi bulanan mencapai 1,33%, dipicu oleh kenaikan signifikan komoditas menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, antara lain daging ayam broiler (naik ke Rp52.333/kg), cabai rawit merah (melonjak ke Rp100.000/kg), bawang merah dan bawang putih (naik hingga Rp20.000/kg), serta beras, telur, dan udang.

Risiko ke depan yang perlu diwaspadai meliputi siklus tahunan hari raya yang terus memicu lonjakan permintaan, tingginya volatilitas komoditas cabai, bawang, dan daging ayam yang mencerminkan kerentanan pasokan dan distribusi, serta keterbatasan data karena estimasi inflasi masih berdasarkan 20 komoditas pantauan SP2KP, sehingga belum sepenuhnya mewakili keranjang inflasi nasional yang lebih luas.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Utara adalah tingginya fluktuasi harga komoditas volatil. Cabai rawit merah sempat turun ke Rp41.667/kg di Januari namun melonjak drastis ke Rp100.000/kg di Maret, sementara daging ayam broiler naik dari Rp39.667/kg menjadi Rp52.333/kg, melampaui Harga Acuan Pemerintah (Rp40.000/kg).

Selain itu, masih banyak komoditas yang dijual di atas HAP/HET, seperti bawang merah (HAP Rp41.500/kg, pasar Rp58.333/kg), bawang putih (Rp60.000/kg), dan telur ayam (HAP Rp30.000/kg, pasar Rp34.000/kg), yang mencerminkan kesenjangan antara kebijakan harga dan realitas pasar akibat terbatasnya pasokan serta gangguan distribusi.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi dan pertukaran data antar anggota TPID masih memerlukan peningkatan, sebagaimana diakui dalam laporan. Daerah juga masih sangat rentan terhadap faktor eksternal yang berada di luar kendali, seperti gagal panen, kondisi cuaca, hambatan distribusi, serta kenaikan harga BBM dan kelompok *administered price* (tarif listrik, LPG) yang turut menekan harga kebutuhan pokok.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Lampung Utara telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pengendalian inflasi. Pertama, **Gerakan Pangan Murah (GPM)** dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada 25 Februari di Taman Olah Seni Kotabumi, 10 Maret di Desa Tata Karya (Abung Surakarta), dan 11 Maret di Sungkai Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Asisten Perekonomian, serta Ketua TP PKK, dengan menyediakan komoditas strategis seperti beras SPHP, minyak, gula, telur, cabai, bawang, dan gas elpiji dengan harga terjangkau. Kedua, **inspeksi mendadak (sidak) pasar** dilakukan pada 12 Maret di Pasar Sentral Kotabumi, SPBE, dan Gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan stok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Ketiga, **penguatan koordinasi** dilakukan melalui 8 kali rapat virtual mingguan bersama Kemendagri, serta keikutsertaan dalam *Capability Building* (5-6 Februari) dan *High Level Meeting* (10 Februari) yang difasilitasi Bank Indonesia Provinsi Lampung untuk menyusun strategi antisipasi hari raya. Keempat, **Gerakan Tanam Cabai** serentak diluncurkan pada 13 Januari di 10 kecamatan, disertai pembagian benih varietas unggul (Ferosa dan Sigantung) guna meningkatkan pasokan komoditas cabai yang sangat volatil.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan selama Triwulan I 2026 menunjukkan beberapa keberhasilan, antara lain Gerakan Pangan Murah yang berhasil memberikan akses pangan terjangkau di sejumlah lokasi, koordinasi intensif melalui rapat mingguan dan High Level Meeting yang memperkuat sinergi antar-instansi, serta Gerakan Tanam Cabai yang merupakan langkah antisipatif jangka pendek untuk meningkatkan pasokan komoditas volatil. Namun, masih terdapat tantangan signifikan, tercermin dari inflasi Maret yang melonjak hingga 1,33%, jauh di atas Februari (0,46%), yang menunjukkan kebijakan belum optimal menahan tekanan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, sejumlah komoditas seperti daging ayam, telur, bawang, dan cabai rawit masih dijual di atas HAP/HET, Gerakan Pangan Murah baru mencakup 3 lokasi sehingga belum menjangkau seluruh pasar yang mengalami tekanan harga, dan dampak Gerakan Tanam baru akan terasa pada periode panen berikutnya sehingga belum berkontribusi pada Triwulan I. Dari sisi kelembagaan, TPID Kabupaten Lampung Utara telah beroperasi dengan landasan hukum yang kuat, yaitu Keppres No. 23/2017, Kepmendagri No. 500.05-8135/2017, dan Keputusan Bupati Nomor B/55/01.4-LU/HK/2026, dengan keanggotaan lengkap dari 33 instansi terkait yang mencakup seluruh pemangku kepentingan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan ke depan difokuskan pada penguatan intervensi pasokan dan distribusi melalui perluasan frekuensi dan jangkauan Gerakan Pangan Murah, optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga, serta pemantauan ketat rantai pasok komoditas volatil seperti cabai, bawang, dan daging ayam. Penguatan koordinasi dan data juga menjadi prioritas dengan meningkatkan kecepatan penyampaian data antar anggota TPID, memperkuat peran pembinaan TPID Provinsi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk publikasi harga pasar secara *real-time* guna mengelola ekspektasi masyarakat. Di sisi struktural, perlu didorong perbaikan tata niaga dan sistem logistik daerah, serta dijalin kerjasama antar-daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas yang tidak diproduksi secara lokal. Antisipasi terhadap faktor musiman dan hari raya dilakukan melalui penyusunan rencana kontijensi serta penguatan komunikasi efektif kepada masyarakat. Terakhir, aspek produksi diperkuat dengan percepatan dan perluasan gerakan tanam tidak hanya pada cabai tetapi juga komoditas strategis lainnya seperti bawang merah, serta pemberian dukungan sarana produksi dan pendampingan teknis bagi petani untuk menekan risiko gagal panen akibat cuaca.